

## Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	<b>Kepala Dinas</b>  <b>GUSTAF GRIAPON, ST</b> <b>PEMBINA</b> <b>NIP. 10820112 200801 1 010</b>
	Judul SOP	:	Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan.

**Dasar hukum:**

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

**Keterkaitan:**

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP

**Peringatan:**





Informasi Yang Dikecualikan harus dilaksanakan uji Konsekuensi oleh PPID

1. Personal
2. Komputer / Laptop
3. Jaringan Internet
4. Scanner
5. Telepon

**Penotaan dan Pendataan:**

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

### Sop Pengujian Tentang Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Pejabat/Staf di Unit Tersebut	PPID	Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Kepala Bidang (Koordinator) Bidang Layanan Informasi membuat daftar informasi yang dikecualikan,.				Daftar Informasi Publik	60 Menit	Berkas Daftar Informasi Publik	
	Dikirimkan ke PPID Utama				Daftar Informasi Publik	60 Menit	Berkas Daftar Informasi Publik	
	PPID Utama melakukan uji konsekuensi terhadap nformasi yang dikecualikan,				Daftar Informasi Publik	60 Menit	Berkas Daftar Informasi Publik	